PENGARUH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

NIA AGUSTINA ALIEN

NIM. B1011221006

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Nia Agustina Alien
NIM	: B1011221006
Jurusan	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	: Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan
	: Manusia (IPM) dan Upah Minimum Terhadap
	: Kemiskinan di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 19 Agustus 2026



Nia Agustina Alien
NIM. B1011221006

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nia Agustina Alien
NIM	: B1011221006
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	: Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan :Manusia (IPM) dan Upah Minimum Terhadap :Kemiskinan di Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya saya sendiri yang disusun sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Seluruh data dan referensi yang digunakan telah dicantumkan secara jujur dan sesuai kaidah penulisan ilmiah, serta tidak mengandung unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap etikda atau peraturan akademik Universitas Tanjungpura, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi yang saya tempuh.

Pontianak, 19 Agustus 2026



Nia Agustina Alien
NIM. B1011221006

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Nia Agustina Alien
B1011221006

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 12 Agustus 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Muz'an Sulaiman, S.E., M.M., CIQaR.	19/08/2026	
		NIP 196108241987031003		
2.	Ketua Penguji	Dr. Jumhur, S.E., M.Si.	19/08/2026	
		NIP 196709281997021001		
3.	Anggota Penguji	Eko Supriyanto, S.E., M.E.	19/08/2026	
		NIP 199101212019031013		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 31 AUG 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, puji syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, yang selalu mempermudahkan segala urusan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang dimana sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, dengan judul "Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tidak terlepas dari dukungan bebrbagai pihak. Maka dari itu, dari lubuk hati penulis yang paling dalam, dengan tulus dan ikhlas mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak Muz'an Sulaiman, S.E., M.M., CIQaR. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, membantu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan selesai.
5. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Eko Supriyanto, S.E., M.E. selaku dosen penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang membantu dalam proses administrasi demi kelancaran tugas akhir ini.
9. Kepada orang tua tercinta, Bapak Palentinus Aman dan ibu Thresia Rummiana, penulis ucapkan terimakasih atas doa dan pengorbanan yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis sampai saat ini dapat menyelesaikan Tugas Akhir. Semoga setiap lelah dan air matamu dibalas dengan kebahagiaan dan rejeki yang berlipat, Love you.
10. Kepada adik-adik tercinta, Sesilia Nopia dan Septiana Ellin, penulis ucapkan terimakasih telah selalu hadir, menemani, dan mewarnai hari-hari penulis dengan kaasih dan keceriaan. Unutk adik pertamaku, maaf jika penulis belum bisa memberikan kesempatan dalam menempuh pendidikan hingga ke jenjang universitas.Doakan agar penulis selalu dilancarkan dalam semua usaha dan niat baiknya agar dapat memenuhi semua keinginanmu.
11. Kepada seluruh keluarga besar penulis, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu di berikan keadapa penulis, serta selalu untuk mempertanyakan keadaan penulis selama diperantauan.

12. Kepada pemilik nama Othafianus Hendra, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian, nasihat, serta peran Abang yang begitu berarti dalam perjalanan penulis hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena telah hadir bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sosok Abang yang selama ini tidak pernah penulis dapatkan, yang selalu berusaha memahami, menguatkan, mendengarkan setiap keluh kesah, dan menemani penulis dalam melewati berbagai proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, sekaligus menjadi seseorang yang selalu penulis syukuri kehadirannya.
13. Kepada Adriana Putriani Ellin dan Veneranda Dea Novta, penulis mengucapkan terima kasih karena selalu ada dan bersedia menemani penulis sejak awal semester hingga selesainya tugas akhir ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, waktu, dan kebersamaan yang telah membuat setiap proses terasa lebih ringan. Segala cerita, tawa, dan kenangan bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis.
14. Kepada Yulita Lilianti dan Monika Apriyani, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teman sejak masa SMA hingga saat ini. Terima kasih karena tetap menjaga komunikasi, memberikan dukungan, dan selalu hadir meskipun kita telah menempuh perjalanan masing-masing. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi bagian berharga yang menemani penulis hingga sampai di titik ini.
15. Terima kasih kepada seluruh anggota grup Rawrrrr yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan cerita di setiap kesempatan. Meskipun kita jarang bertemu, setiap kali berkumpul selalu ada banyak cerita dan tawa yang tidak ada habisnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan kenangan selama penyusunan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada seluruh teman yang telah hadir dan terlibat dalam perjalanan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, cerita, dan kebersamaan yang telah diberikan. Setiap momen yang dilalui bersama menjadi bagian berharga yang turut mewarnai perjalanan ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik.
17. Terima kasih kepada diri sendiri, yang telah bertahan melewati setiap proses, rasa lelah, keraguan, dan berbagai hal yang tidak selalu mudah selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah, bahkan ketika rasanya ingin menyerah, dan tetap berusaha meskipun tidak selalu tahu bagaimana hasil akhirnya.Sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah, tetapi semua perjuangan, air mata, waktu, dan usaha yang telah diberikan akhirnya terbayarkan. Banggalah pada diri sendiri karena telah mampu melewati satu perjalanan yang panjang.Namun, perjalanan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari semuanya. Awal untuk melangkah ke perjalanan yang lebih luas, menghadapi tantangan baru, mengejar mimpi yang lebih besar, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Semoga setelah ini, diri ini tetap kuat, tetap rendah hati, dan selalu percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa pada sesuatu yang indah di kemudian hari.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kritik dan saran yang sangat membangun sangat penulis harapkan dengan tujuan tugas akhir ini menjadi tulisan yang baik. Akhirnya penulis ingin mengungkapkan bahwa.

“Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang terus berusaha dan percaya, karena setiap perjuangan memiliki waktunya sendiri dan waktu Tuhan selalu menjadi yang terbaik”

Pontianak 19 Agustus 2026



Nia Agustina Alien
NIM.B1011221006

PENGARUH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

[1]Nia Agustina Alien

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of Unemployment, Human Development Index, and Provincial Minimum Wage on the poverty rate in West Kalimantan during the period 2019-2025. This study uses a quantitative approach with panel data and multiple linear regression analysis. The research findings show that partially Unemployment has a positive but insignificant effect on proverty, the Human Development Index has a negative but significant effect on poverty, while the provincial Minimum Wage has a negative but insignificant effect on poverty. Simultaneously, these three variables have a significant effect on the poverty rate in West Kalimantan. These findings indicate that improving yhe uality of human development is an important factor in efforts to reduce poverty in the region.

Keywords : *poverty, unemployment, provincial minimum wage, West Kalimantan region.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat selama Periode 2019-2025. Penelitian ini menggunakan pendepkatan kuantitatif dengan data panel dan analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian menunjukan secara parsial Pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Upah Minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Temuan ini menunjukan peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi faktor penting dalam upaya penurunan kemiskinan di daerah tersebut.

Kata kunci: *Kemiskinan, Pengangguran, IPM, Upah Minimum, Kalimantan Barat*

PENGARUH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data pada September 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 8,25%, turun 0,22 poin dari Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang. Namun, di Kalimantan Barat masalah ini masih cukup serius karena pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 322,54 ribu jiwa, dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Di tingkat kabupaten/kota, kemiskinan tertinggi terdapat di Melawi 10,51%**,** Landak 8,90%**,** Kayong Utara 8,75%, dan Ketapang 8,44%, sedangkan yang terendah terdapat di Kubu Raya 3,99%, Pontianak 4,00%, dan Singkawang 4,28%. Data tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan kemiskinan antarwilayah di Kalimantan Barat. Kemiskinan di Kalimantan Barat diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum. Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di Pontianak 7,91%**,** Singkawang 7,42%, dan Kubu Raya 6,86%, sedangkan yang terendah berada di Kapuas Hulu 2,09%, Sekadau 2,54%, dan Landak 2,69%. Dari sisi pembangunan manusia, IPM tertinggi dimiliki Pontianak 82,80 dan Singkawang 75,67, sementara Kayong Utara menjadi yang terendah dengan 67,60. Selain itu, upah minimum juga berbeda antarwilayah, dengan Ketapang sebagai daerah tertinggi sebesar Rp3.396.267 dan beberapa daerah seperti Mempawah, Sekadau, dan Kubu Raya berada pada angka terendah, yaitu Rp2.878.286. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis TPT, IPM, dan Upah Minimum terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari masih tingginya tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat meskipun berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menekan angka kemiskinan secara merata di seluruh wilayah. Di beberapa daerah, terutama wilayah kabupaten, masih terlihat kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, maupun besaran upah. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kemiskinan di Kalimantan Barat lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan, kualitas pembangunan manusia, atau kebijakan pengupahan yang berlaku di daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu apakah TPT berpengaruh terhadap kemiskinan, apakah IPM berpengaruh terhadap kemiskinan dan apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap

kemiskinan di Kalimantan Barat. Oleh karena itu,permasalahan ini perlu dianalisis secara empiris bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh TPT terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat.
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap kemiskina di Kalimantan Barat.
3. Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa angka-angka statistik yang diolah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kausal bertujuan untuk melihat hubungan sebab-akibat antara variabel bebas (Pengangguran, IPM, Upah Minimum) terhadap variabel terikat (Kemiskinan). Data yang di gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai sumber literatur lainnya. Data yang digunakan berbentuk data panel, yaitu gabungan antara data time series selama periode 2019-2025 dan data cross section dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Metode analsisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak eviews 12. Untuk menentukan model terbaik, dilakukan uji Chow, uji hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas untuk memastikan model yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukan bahwa model regresi terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman. Dari hasil analisis regresi, diketahui bahwa variabel TPT memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan atau penurunan pengangguran terbuka belum terbukti secara nyata memengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Sementara itu, variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ini berarti semakin tinggi IPM, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun secara nyata. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan. Selain itu variabel Upah Minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, meskipun arah pengaruhnya menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan kemiskinan, secara statistik pengaruh tersebut belum cukup kuat. Hasil

uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Ini berarti pengangguran terbuka, IPM, dan upah minimum secara kolektif memang memiliki kaitan penting dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan sebagian besar variasi kemiskinan. Dengan kata lain, model yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan fenomena kemiskinan pada wilayah dan periode penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kalimantan Barat tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai variabel ekonomi dan sosial.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Artinya, perubahan jumlah pengangguran belum terbukti secara nyata memengaruhi tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Sementara itu, upah minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sehingga kenaikan upah belum tentu langsung menurunkan kemiskinan karena tidak semua penduduk miskin bekerja di sektor formal. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi faktor yang paling penting dalam pengentasan kemiskinan.

Adapun rekomendasinya, pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan IPM melalui pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, penciptaan lapangan kerja perlu diperluas agar pengangguran dapat ditekan dan pendapatan masyarakat meningkat. Kebijakan upah minimum juga sebaiknya disertai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan sektor formal agar dampaknya lebih terasa terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau ketimpangan pendapatan agar analisis terhadap kemiskinan menjadi lebih lengkap.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH viii
ABSTRAK xi
RINGKASAN xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
1 PENDAHULUAN 2
2 KAJIAN LITERATUR 7
2.1 Tinjauan Teori 7
2.1.1 Pengangguran 7
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 8
2.1.3 Upah Minimum 8
2.1.4 Kemiskinan 8
2.2 Kajian Empiris 9
2.3 Pengaruh Antar Variabel 11
2.3.1 Pengaruh Pengngguran terhadap Kemiskinan 11
2.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan 11
2.3.3 Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan 11
2.4 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 12
2.4.1 Kerangka Konseptual 12
2.4.2 Hipotesis Penelitian 12
3 METODE PENELITIAN 12
3.1 Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 12
3.2 Jenis dan Sumber Data 13
3.3 Definisi Operasional Variabel 13
3.4 Metode Analisis Data 13
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 15
4.1 Hasil Penelitian 15
4.1.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 15
4.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda 16
4.1.3 Uji Asumsi Klasik 17
4.1.4 Uji Hipotesis 18
4.2 Pembahasan 19

4.2.1 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan 19
4.2.2 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan 20
4.2.3 Pengaruh UMK terhadap Kemiskinan 21
5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI 22
5.1 Simpulan 22
5.2 Rekomendasi 22
DAFTAR RUJUKAN 23
LAMPIRAN 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 12

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas 17

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel 15
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Linear Bergandda dengan Model Fixed Effect Model 16
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolineritas 17
Tabel 4. 4 Hasil Uji t (Uji Parsial) 18
Tabel 4. 5 Hasil Uji F (Uji Parsial) 18
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinan Adjusted (R^2) 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian 25
Lampiran 2 Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik..... 29
Lampiran 3 Hasil Uji Asumsi Klasik..... 29
Lampiran 4 Hasil Uji Hipotesis 30

PENGARUH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

[1]Nia Agustina Alien

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of Unemployment, Human Development Index, and Provincial Minimum Wage on the poverty rate in West Kalimantan during the period 2019-2025. This study uses a quantitative approach with panel data and multiple linear regression analysis. The research findings show that partially Unemployment has a positive but insignificant effect on proverty, the Human Development Index has a negative but significant effect on poverty, while the provincial Minimum Wage has a negative but insignificant effect on poverty. Simultaneously, these three variables have a significant effect on the poverty rate in West Kalimantan. These findings indicate that improving yhe uality of human development is an important factor in efforts to reduce poverty in the region.

Keywords : *poverty, unemployment, provincial minimum wage, West Kalimantan region.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat selama Periode 2019-2025. Penelitian ini menggunakan pendepkatan kuantitatif dengan data panel dan analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian menunjukan secara parsial Pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Upah Minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Temuan ini menunjukan peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi faktor penting dalam upaya penurunan kemiskinan di daerah tersebut.

Kata kunci: *kemiskinan, pengangguran, IPM, upah minimum, Kalimantan Barat*

B1011221006@student.untan.ac.id

1 PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam suatu negara tidak hanya di lihat dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh dalam negara tersebut, tetapi seberapa banyak masyarakat miskin dalam suatu negara. Kemiskinan sendiri menjadi persoalan yang tidak ada habisnya dalam negara berkembang maupun negara maju. Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, sehingga berkontribusi pada pemerataan pembangunan yang adil (Febrianti et al., 2024). Menurut World Bank (2012), kemiskinan disebabkan oleh minimnya pendapatan dan kepemilikan aset sehingga individu atau rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, tempat tinggal, termasuk standar kesehatan dan pendidikan yang layak (Martono, 1986). Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja; mereka yang dikategorikan sebagai miskin sering kali tidak memiliki pekerjaan (mengalami pengangguran), dan umumnya tingkat pendidikan serta kondisi kesehatan mereka kurang memadai (Rahmawati et al., 2022).

Secara konseptual, kemiskinan tidak hanya berarti pendapatan rendah, tetapi juga akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Todaro (2012) menekankan kemiskinan bersifat multidimensional dan mempengaruhi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan produktivitas. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah mendasar yang perlu ditangani secara komprehensif, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kemiskinan adalah masalah mendasar yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai tindakan guna memerangi kemiskinan, namun mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan masih menjadi tantangan. Program-program seperti bantuan langsung tunai, kartu Indonesia pintar, dan kartu Indonesia sehat telah menunjukkan dampak positif, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh masalah targetting dan koordinasi antarlembaga. Pada September 2025 persentase penduduk miskin sebesar 8,25%, menurun sebesar 0,22% dari maret 2025, yang dimana pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin sebanyak 23,36 juta, mengalami penurunan 0,49 juta orang dari maret 2025. Penurunan ini menunjukkan tren positif, namun laju penurunannya masih perlu dipercepat agar target pembangunan nasional dapat tercapai.

Namun jika dilihat menurut pulau penduduk miskin terbanyak terdapat pada pulau maluku dan papua sebesar 18,22% (Penduduk & September,2026). Tingginya angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi antardaerah, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, infrastruktur, dan akses terhadap layanan dasar. Permasalahan kemiskinan ini menjadi permasalah pokok termasuk di Kalimantan Barat sendiri, dimana angka kemiskinan di Kalimantan Barat sendiri menjadi angka tertinggi dibandingkan Kalimantan lain. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dari pembuat kebijakan, mengingat Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun belum sepenuhnya mampu mentransformasikannya menjadi kesejahteraan bagi seluruh penduduknya.

Tabel 1. 1 Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2025 (jiwa)

Provinsi	2025
	September (ribu)
Kalimantan Barat	322,54
Kalimantan Timur	202,04
Kalimantan Selatan	168,81
Kalimantan Utara	42,45
Kalimantan Tengah	141,75

Sumber: Badan Pusat Statistik 2026

Jumlah penduduk miskin di pulau Kalimantan pada tahun 2025 menunjukkan Kalimantan Barat memiliki angka tertinggi, yaitu sekitar 322,54 ribu jiwa dan Kalimantan Utara paling rendah dengan 42,45 ribu jiwa. Angka ini menggambarkan ketimpangan kemiskinan di Kalimantan masih cukup besar, dengan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang paling banyak penduduk miskinnya, sementara Kalimantan Utara relatif lebih kecil baik dari sisi jumlah maupun skala populasi. Secara keseluruhan, data menunjukkan wilayah pedalaman dan perdesaan di Kalimantan masih menjadi titik fokus utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mencatat tren penurunan jumlah penduduk miskin dari periode sebelumnya.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Barat Tahun 2025 (persen)

Kabupaten/Kota	Persentase (%)
Sambas	6,37
Bengkayang	5,83
Landak	8,90
Mempawah	4,49
Sanggau	4,61
Ketapang	8,44
Sintang	7,93
Kapuas Hulu	6,86
Sekadau	5,61
Melawi	10,51
Kayong Utara	8,75
Kubu Raya	3,99
Pontianak	4,00
Singkawang	4,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimatan Barat (2026)

Data persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan kesenjangan antarwilayah yang cukup jelas. Kabupaten Melawi mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 10,51%, diikuti Landak (8,90%), Kayong Utara (8,75%), dan

Ketapang (8,44%). Tingginya angka di wilayah tersebut umumnya dipengaruhi oleh kondisi geografis serta terbatasnya akses terhadap sektor ekonomi formal. Sebaliknya, persentase terendah terdapat di wilayah perkotaan dan daerah penyangga ibu kota provinsi, seperti Kubu Raya (3,99%), Pontianak (4,00%), Singkawang (4,28%), Mempawah (4,49%), dan Sanggau (4,61%). Kondisi ini mencerminkan keunggulan infrastruktur, akses pendidikan, serta ketersediaan lapangan kerja yang lebih beragam.

Secara makro, tingkat kemiskinan provinsi sebesar 6,16% pada Maret 2025 menunjukkan tren penurunan yang cukup baik, meskipun penanganan di wilayah dengan angka tinggi masih menjadi prioritas. Secara empiris, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran, karena penurunan kesempatan kerja akan berdampak pada berkurangnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Ashari et al., 2023).

Tabel 1. 3 Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Barat Tahun 2025 (persen)

Kabupaten/Kota	Persentase (%)
Sambas	4,91
Bengkayang	2,95
landak	2,69
Mempawah	4,74
Sanggau	3,89
Ketapang	6,75
Sintang	2,78
Kapuas hulu	2,09
Sekadau	2,54
Melawi	2,94
Kayong Utara	3,77
Kubu Raya	6,86
Pontianak	7,91
Singkawang	7,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimatan Barat (2026)

Data pengangguran Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan perbedaan mencolok antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kota Pontianak mencatat TPT tertinggi sebesar 7,91%, diikuti Singkawang (7,42%) dan Kubu Raya (6,86%). Tingginya angka ini mencerminkan karakteristik ekonomi perkotaan yang bergantung pada sektor formal, sehingga terbentuk ketimpangan antara pencari kerja dan lowongan kerja lebih terasa. Sebaliknya, Kapuas Hulu memiliki TPT terendah sebesar 2,09%, diikuti Sekadau (2,54%) dan Landak (2,69%). Rendahnya TPT di wilayah kabupaten tidak selalu menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, melainkan dipengaruhi oleh dominasi sektor informal seperti pertanian dan perkebunan yang mampu menyerap tenaga kerja, meskipun produktivitasnya relatif rendah.

Menurut Permatasari (2024) pengangguran terbuka mencakup individu yang belum bekerja, dalam proses mempersiapkan usaha, atau tidak aktif mencari pekerjaan karena

keterbatasan peluang. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan adanya perbedaan tantangan ketenagakerjaan: wilayah perkotaan menghadapi ketatnya persaingan kerja formal, sedangkan wilayah kabupaten perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor non-formal.

Selain Selain pengangguran, indikator lain yang menyebabkan kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kualitas hidup secara komprehensif dengan menggabungkan tiga dimensi utama: kesehatan (harapan hidup), pendidikan (tingkat melek huruf dan lama sekolah), dan taraf hidup yang layak (pendapatan per kapita). IPM mencerminkan kualitas manusia secara langsung. Semakin tinggi persentase IPM, maka kualitas hidup masyarakat akan semakin baik dan kesejahteraan individu juga akan meningkat.

Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Poin
Sambas	72,08
Bengkayang	70,99
landak	69,92
Mempawah	70,59
Sanggau	70,36
Ketapang	71,30
Sintang	70,92
Kapuas hulu	69,24
Sekadau	68,73
Melawi	69,80
Kayong Utara	67,60
Kubu Raya	72,01
Pontianak	82,80
Singkawang	75,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimatan Barat (2026)

Analisis terhadap data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kualitas hidup yang cukup mencolok antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kota Pontianak memimpin dengan capaian IPM tertinggi yakni 82,80, disusul oleh Kota Singkawang dengan skor 75,67, yang menunjukkan kedua wilayah ini memiliki akses jauh lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dibandingkan wilayah lainnya. Angka-angka ini mencerminkan keunggulan fasilitas publik dan dinamika ekonomi perkotaan yang memungkinkan penduduknya mencapai taraf hidup yang lebih maju.

Di sisi lain, mayoritas kabupaten di Kalimantan Barat memiliki skor IPM yang berada di kisaran 67 hingga 72, dengan Kabupaten Kayong Utara mencatatkan angka terendah sebesar 67,60. Kabupaten lainnya seperti Kapuas Hulu (69,24), Sekadau (68,73), dan Melawi (69,80) juga menunjukkan tantangan serupa dalam meningkatkan taraf pembangunan manusianya. Perbedaan signifikan antara kota dan kabupaten ini

menegaskan pembangunan manusia di Kalimantan Barat masih terpusat di wilayah urban, sementara daerah-daerah dengan IPM di bawah 70 memerlukan akselerasi lebih lanjut dalam perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, data IPM ini menjadi indikator penting meskipun ekonomi daerah terus berkembang, upaya meratakan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok provinsi tetap menjadi tantangan struktural yang krusial.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu upah minimum. Ketidakseimbangan upah minimum dengan konsumsi rumah tangga membuat upah yang didapatkan tidak mencukupi konsumsi rumah tangga. Upah ialah sumber pendapatan utama seseorang, upah tersebut harus sepenuhnya menutupi biaya hidup pekerja dan keluarganya. Melalui upah, pemberi kerja memberikan kompensasi atas energi dan usaha yang dikeluarkan oleh pekerja. Upah adalah imbalan finansial oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah atau sedang dilkukan, dinyatakan dalam mata uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau sebagaimana ditentukan oleh hukum, dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan karyawan, untuk kepentingan karyawan dan keluarganya. (Todaro & Smith, 2003).

Tabel 1. 5 Upah Minimum Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2025 (juta rupuah)

Kabupaten/Kota	Juta Rupiah
Sambas	3.015.520
Bengkayang	3.062.260
landak	3.054.906
Mempawah	2.878.286
Sanggau	2.970.885
Ketapang	3.396.267
Sintang	3.039.805
Kapuas hulu	2.924.501
Sekadau	2.878.286
Melawi	2.953.711
Kayong Utara	3.220.756
Kubu Raya	2.878.286
Pontianak	3.034.820
Singkawang	3.074.566

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (2026)

Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kalimantan Barat tahun 2025 menunjukkan adanya variasi besaran upah yang mencerminkan karakteristik ekonomi serta biaya hidup di masing-masing wilayah. Kabupaten Ketapang tercatat memiliki UMK tertinggi sebesar Rp3.396.267, kemungkinan besar didorong oleh dominasi sektor pertambangan dan perkebunan skala besar yang mampu memberikan standar upah lebih kompetitif. Di posisi berikutnya, Kabupaten Kayong Utara menempati urutan kedua dengan upah sebesar Rp3.220.756, yang juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi lokal di wilayah tersebut.

Sebaliknya, terdapat beberapa wilayah yang memiliki standar UMK terendah dengan angka yang sama, yaitu sebesar Rp2.878.286, meliputi Kabupaten Mempawah, Sekadau, dan Kubu Raya. Besaran upah yang relatif seragam di wilayah-wilayah ini menunjukkan ketergantungan pada struktur ekonomi yang serupa atau adanya kebijakan penyesuaian upah yang mengacu pada parameter dasar yang sama di tingkat daerah. Secara keseluruhan, data UMK ini menggambarkan pusat-pusat industri ekstraktif dan daerah yang memiliki aktivitas ekonomi spesifik cenderung memberikan kompensasi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga menciptakan perbedaan besaran upah minimum antar kabupaten/kota di seluruh provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat kemiskinan di Kalimantan Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengangguran, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat upah. Meskipun beberapa indikator menunjukkan perbaikan, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan kajian empiris yang lebih komprehensif.

Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2025. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi regional dan memberikan wawasan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif serta menargetkan upaya pengurangan kemiskinan secara lebih tepat.